ORATIO directa

Vol. 8, No. 1, (2026) - pp. 20-23
10.59017/oratiodirecta.v8i1.119

MARHAEN DIGITAL: PEMIKIRAN SOEKARNO, TEKNOLOGI, DAN GENERASI Z

Digital Marhaens: Soekarno's Thought, Technology, and Generation Z

Novance Silitonga; Harsen Roy Tampomuri

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bung Karno
*Email: novanceesilitonga@ubk.ac.id; harsentampomuri@ubk.ac.id

Abstract: *Digital technology and platform capitalism have transformed economic and political relations while producing new forms of inequality. This conceptual study examines the contemporary relevance of Soekarno's Marhaenism and its relationship to platform workers and Generation Z. It synthesizes literature on Marhaenism, digital labor, algorithmic management, gig-work hazards, and digital activism. The analysis defines digital Marhaens as economically vulnerable actors who may own operational tools such as motorcycles, smartphones, or computers but do not control the platforms, algorithms, data, pricing, or access rules that organize their work. Technology is therefore ambivalent: it expands market access, livelihood options, and public voice while also intensifying dependence, surveillance, work insecurity, and unequal value extraction. Generation Z is positioned as a potential ally because of its familiarity with networked media and digital mobilization, not as a uniformly progressive or homogeneous group. The meeting point between digital Marhaens and Generation Z lies in collective visibility, critical digital literacy, worker organization, and demands for platform accountability. Digital Marhaenism should consequently be understood as a normative framework for technological justice rather than a rejection of technology. Because the study does not collect worker interviews, platform data, or Generation Z survey evidence, its conclusions remain conceptual propositions that require empirical testing in Indonesian platform economies.*

Keywords: Digital Marhaenism; Soekarno; Platform capitalism; Gig workers; Generation Z

Abstrak: Teknologi digital dan kapitalisme platform telah mengubah relasi ekonomi serta politik sekaligus menghasilkan bentuk baru ketimpangan. Kajian konseptual ini membahas relevansi kontemporer Marhaenisme Soekarno dan hubungannya dengan pekerja platform serta Generasi Z. Analisis menyintesis literatur mengenai Marhaenisme, kerja digital, manajemen algoritmik, risiko kerja gig, dan aktivisme digital. Marhaen digital didefinisikan sebagai aktor yang rentan secara ekonomi dan mungkin memiliki alat operasional seperti sepeda motor, telepon pintar, atau komputer, tetapi tidak menguasai platform, algoritma, data, harga, atau aturan akses yang mengorganisasi pekerjaannya. Teknologi karena itu bersifat ambivalen: memperluas akses pasar, peluang penghidupan, dan suara publik, sekaligus meningkatkan ketergantungan, pengawasan, ketidakamanan kerja, dan ekstraksi nilai yang tidak setara. Generasi Z diposisikan sebagai sekutu potensial karena kedekatannya dengan media berjaringan dan mobilisasi digital, bukan sebagai kelompok yang seragam atau selalu progresif. Titik temu marhaen digital dan Generasi Z terletak pada visibilitas kolektif, literasi digital kritis, pengorganisasian pekerja, dan tuntutan akuntabilitas platform. Marhaenisme digital dengan demikian merupakan kerangka normatif bagi keadilan teknologi, bukan penolakan terhadap teknologi. Karena kajian tidak mengumpulkan wawancara pekerja, data platform, atau survei Generasi Z, simpulannya berupa proposisi konseptual yang perlu diuji dalam ekonomi platform Indonesia.

Kata Kunci: Marhaenisme digital; Soekarno; Kapitalisme platform; Pekerja gig; Generasi Z

1. Pendahuluan

Marhaenisme berkembang dalam pergulatan antikolonial Soekarno dan digunakan untuk membaca pengalaman rakyat kecil yang hidup dari kerja sendiri tetapi berada dalam struktur ekonomi yang menindas. Istilah Marhaen mengacu pada figur petani kecil yang memiliki alat produksi terbatas dan menggunakannya terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gagasan tersebut kemudian meluas sebagai bahasa politik mengenai kaum tani, nelayan, pekerja, pedagang kecil, dan kelompok marjinal lainnya (Adams, 1965; Kuswono, 2016).

Perubahan teknologi menggeser bentuk alat produksi, organisasi kerja, dan relasi antara pemilik modal dengan pekerja. Sepeda motor, telepon pintar, koneksi internet, komputer, akun platform, dan data kini menjadi bagian dari proses produksi. Namun, kepemilikan alat operasional tidak selalu memberi kendali atas harga, distribusi pekerjaan, penilaian kinerja, akses pelanggan, maupun pendapatan. Platform dan algoritma dapat menjadi infrastruktur privat yang mengatur kehidupan pekerja.

Perjumpaan Marhaenisme dengan ekonomi digital memunculkan pertanyaan konseptual. Apakah pekerja platform yang memiliki kendaraan atau gawai tetapi bergantung pada aturan aplikasi dapat dibaca sebagai marhaen digital? Bagaimana teknologi sekaligus membuka peluang dan menciptakan eksploitasi? Di mana posisi Generasi Z yang tumbuh bersama internet, media sosial, dan aktivisme berjaringan?

Artikel ini bertujuan merumuskan konsep marhaen digital sebagai alat baca terhadap kerja platform dan mengkaji kemungkinan hubungan politiknya dengan Generasi Z. Kajian tidak menganggap seluruh pekerja gig memiliki pengalaman

yang sama atau seluruh Generasi Z berpihak pada keadilan sosial. Fokusnya ialah membangun proposisi yang dapat digunakan untuk penelitian empiris dan diskusi kebijakan teknologi.

2. Metode Kajian

Penelitian menggunakan pendekatan konseptual dengan sintesis literatur. Bahan kajian mencakup tulisan mengenai Marhaenisme Soekarno, kerja digital, kapitalisme platform, manajemen algoritmik, keselamatan pekerja gig, karakteristik Generasi Z, dan aktivisme digital. Konsep-konsep dibandingkan untuk mengidentifikasi kesinambungan, perbedaan historis, dan batas analogi antara marhaen pada ekonomi agraris-kolonial dan pekerja pada ekonomi platform.

Analisis dilakukan melalui empat langkah: mendefinisikan unsur dasar Marhaenisme; memetakan alat produksi, kontrol, ketergantungan, dan ekstraksi nilai dalam kerja platform; menilai ambivalensi teknologi sebagai akses dan penguasaan; lalu merumuskan titik temu dengan aktivisme Generasi Z. Kajian tidak menggunakan wawancara, observasi, data pendapatan, data algoritma, atau survei generasi. Karena itu, istilah marhaen digital diposisikan sebagai konstruksi analitis normatif, bukan kategori statistik atau identitas yang telah dikonfirmasi pekerja.

3. Landasan Filosofis Marhaenisme

3.1. Marhaen sebagai Subjek Politik

Soekarno menggunakan Marhaenisme untuk membumikan perjuangan antikolonial pada kondisi masyarakat Indonesia. Dalam kisah autobiografis, perjumpaan dengan seorang petani di Bandung Selatan menjadi simbol rakyat yang bekerja dengan alat sendiri tetapi tidak memperoleh kehidupan yang layak. Marhaen bukan semata-mata proletar tanpa alat produksi; ia dapat memiliki cangkul, sawah kecil, perahu, gerobak, atau sarana lain, tetapi tetap berada dalam relasi ekonomi yang membatasi kemandirian.

Marhaenisme menolak penindasan manusia atas manusia dan menempatkan kemerdekaan politik bersama keadilan sosial. Subjeknya mencakup buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi, pekerja informal, dan kelompok miskin lain. Kerangka ini tidak hanya menggambarkan penderitaan, tetapi juga menuntut pembentukan kekuatan politik agar kelompok marjinal dapat mengubah struktur yang menghasilkan ketergantungan.

3.2. Transformasi Alat Produksi

Pada ekonomi digital, alat produksi tidak lagi hanya berbentuk tanah, mesin, atau kendaraan. Akses terhadap aplikasi, identitas digital, sistem pembayaran, reputasi daring, data, dan jaringan pelanggan menentukan kemampuan bekerja. Petani memerlukan akses pasar digital, pedagang kecil bergantung pada aplikasi pembayaran atau niaga elektronik, dan pengemudi menggunakan gawai serta kendaraan untuk menerima pesanan.

Perubahan tersebut tidak menghapus ketimpangan. Pekerja dapat membiayai kendaraan, telepon, bahan bakar, koneksi, dan perawatan, sementara platform menentukan komisi, insentif, pemeringkatan, penangguhan akun, dan distribusi kerja. Kepemilikan alat operasional berada di tangan pekerja, tetapi kendali atas infrastruktur koordinasi dan data berada pada perusahaan.

4. Marhaenisme Digital

4.1. Definisi dan Batas Konsep

Marhaen digital adalah istilah analitis bagi pekerja atau produsen kecil yang memiliki sebagian sarana kerja, menggunakan teknologi digital untuk memperoleh penghasilan, tetapi tidak menguasai sistem platform yang mengorganisasi akses, harga, reputasi, dan pendapatannya. Contohnya dapat mencakup pengemudi transportasi daring, kurir, pekerja lepas, pedagang mikro pada lokapasar, atau kreator kecil yang bergantung pada algoritma distribusi.

Tabel 1: Transformasi Konseptual Marhaen ke Marhaen Digital

Dimensi	Marhaen klasik	Marhaen digital
Alat kerja	Cangkul, sawah kecil, perahu, gerobak, atau alat sederhana.	Kendaraan, telepon pintar, komputer, akun, dan koneksi.
Kontrol	Terbatas oleh struktur kolonial, pasar, modal, dan penguasaan tanah.	Terbatas oleh platform, algoritma, data, harga, dan akses akun.
Nilai	Produksi subsisten atau skala kecil dengan hasil yang terbatas.	Layanan, konten, interaksi, reputasi, dan data menghasilkan nilai platform.
Kerentanan	Kemiskinan, eksploitasi, ketergantungan, dan lemahnya daya tawar.	Pendapatan tidak pasti, biaya dialihkan, pengawasan, dan kesenjangan perlindungan.

Sumber: sintesis konseptual berdasarkan naskah sumber dan literatur kerja platform.

Analogi ini memiliki batas. Pekerja platform berbeda dalam keterampilan, modal, status kontrak, lokasi, dan daya tawar. Kreator, pengemudi, petani digital, dan pekerja lepas tidak dapat dilebur menjadi satu kelas yang homogen. Istilah marhaen digital berguna jika membantu mengidentifikasi hubungan kepemilikan dan kontrol; ia menjadi lemah jika hanya dipakai sebagai slogan tanpa data mengenai pendapatan, biaya, risiko, dan tata kelola platform.

4.2. Kapitalisme Platform dan Kontrol Algoritmik

Kapitalisme platform menempatkan data, algoritma, jaringan pengguna, dan efek skala sebagai sumber utama nilai. Pekerja menghasilkan layanan, interaksi, reputasi, lokasi, dan data perilaku, sedangkan platform mengatur pertemuan antara pekerja dan konsumen. Sistem pemeringkatan, insentif, target, dan suspensi akun dapat membentuk disiplin kerja tanpa pengawasan langsung (Gandini, 2021; Vallas & Schor, 2020; Wang & Tomassetti, 2024).

Ketergantungan tersebut menimbulkan ketidakpastian pendapatan, tekanan waktu, biaya kerja yang dialihkan kepada pekerja, serta kesenjangan perlindungan. Tinjauan sistematis Taylor et al. (2023) menunjukkan bahwa bahaya dalam ekonomi gig banyak berasal dari tingkat sistem dan perusahaan, dengan kontrol platform serta ketidakamanan kerja sebagai faktor dominan. Temuan ini mendukung kebutuhan membaca eksploitasi sebagai masalah struktural, bukan sekadar kegagalan adaptasi individual.

4.3. Teknologi sebagai Akses dan Penguasaan

Teknologi memperluas akses pasar, menurunkan biaya pencarian konsumen, membuka peluang kerja, dan memungkinkan mobilisasi politik. Bagi produsen kecil, konektivitas dapat memperluas jangkauan penjualan dan informasi. Bagi pekerja, platform dapat memberi fleksibilitas waktu dan pintu masuk yang relatif cepat. Manfaat tersebut nyata, tetapi tidak merata dan sering disertai ketergantungan pada infrastruktur privat.

Di sisi lain, pengumpulan data, desain insentif, dan ketidakjelasan algoritma memungkinkan pengawasan serta pengendalian. Kebebasan memilih waktu kerja dapat berhadapan dengan kebutuhan mengejar target, tarif dinamis, persaingan, atau risiko kehilangan akun. Marhaenisme digital tidak menolak teknologi; ia menuntut agar desain, kepemilikan, dan regulasi teknologi diarahkan pada kemandirian, kesejahteraan, dan pembagian nilai yang adil.

Tabel 2: Ambivalensi Teknologi bagi Marhaen Digital

Dimensi	Peluang	Risiko
Akses	Pasar, pelanggan, informasi, dan pekerjaan lebih mudah dijangkau.	Ketergantungan pada akun, koneksi, dan infrastruktur privat.
Fleksibilitas	Waktu dan jenis kerja dapat dipilih secara terbatas.	Insentif dan target algoritmik mendorong jam kerja panjang.
Data	Rekam kerja dapat mendukung reputasi dan layanan.	Pengawasan, asimetri informasi, dan ekstraksi nilai data.
Suara publik	Kesaksian, solidaritas, dan advokasi dapat diperluas.	Viralitas singkat, manipulasi, dan ketergantungan pada algoritma distribusi.

Sumber: sintesis analitis; bukan hasil survei pekerja.

5. Marhaen Digital dan Generasi Z

5.1. Generasi Z sebagai Aktor Beragam

Generasi Z sering digambarkan sebagai generasi yang tumbuh bersama internet, ponsel pintar, dan media sosial. Kedekatan teknologi memengaruhi cara belajar, berkomunikasi, bekerja, dan berpartisipasi politik (Jayatissa, 2023; Peredy et al., 2024). Namun, kategori generasi tidak menjamin tingkat keterampilan yang sama, akses yang merata, orientasi politik tertentu, atau kepedulian otomatis terhadap pekerja platform.

Penelitian tentang politik anak muda menunjukkan kombinasi minat, ketidakcukupan informasi, dan kebutuhan pendidikan politik (Robin, Alvin, & Hasugian, 2022). Karena itu, Generasi Z lebih tepat diposisikan sebagai ruang potensi. Sebagian dapat menjadi pekerja platform, konsumen, kreator, pengembang teknologi, aktivis, atau pembuat kebijakan masa depan; posisi tersebut menghasilkan kepentingan yang tidak selalu sejalan.

5.2. Aktivisme Digital dan Pembentukan Kekuatan

Media sosial memungkinkan pengalaman ketidakadilan memperoleh visibilitas melalui kesaksian, video, tagar, petisi, penggalangan dukungan, dan koordinasi aksi. Dalam bahasa politik Soekarno, proses ini dapat dibaca sebagai pembentukan kekuatan ketika keluhan individual dihubungkan menjadi agenda kolektif. Generasi Z berpotensi membantu menerjemahkan persoalan pekerja platform ke dalam narasi publik yang mudah dipahami.

Visibilitas belum tentu menghasilkan perubahan. Viralitas dapat berlangsung singkat, menyederhanakan masalah, atau bergantung pada platform yang sama dengan sumber ketimpangan. Titik temu yang lebih kuat memerlukan organisasi pekerja, dokumentasi bukti, literasi data, advokasi regulasi, dukungan konsumen, dan aliansi dengan kelompok masyarakat sipil. Aktivisme digital perlu terhubung dengan negosiasi institusional dan perlindungan hukum.

5.3. Agenda Keadilan Teknologi

Marhaenisme digital dapat diterjemahkan ke dalam agenda transparansi algoritma, kejelasan komisi dan insentif, mekanisme banding suspensi akun, jaminan sosial portabel, perlindungan keselamatan, akses terhadap data kerja, serta ruang perundingan kolektif. Kebijakan juga perlu membedakan jenis platform dan pekerjaan agar perlindungan tidak menghapus fleksibilitas yang benar-benar dibutuhkan pekerja.

Generasi Z dapat berkontribusi melalui riset partisipatif, desain teknologi yang bertanggung jawab, pengembangan

koperasi platform, kampanye berbasis bukti, dan konsumsi yang memperhatikan kondisi kerja. Perjuangan teknologi yang adil tidak berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi mencakup pertanyaan tentang siapa yang merancang sistem, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana nilai dibagikan.

6. Keterbatasan Kajian

Artikel ini menyusun analogi konseptual dan tidak menguji penerimaan istilah marhaen digital di kalangan pekerja. Tidak ada data pendapatan, biaya, jam kerja, demografi, kebijakan platform, atau wawancara Generasi Z. Gambar statistik dalam naskah lama tidak disertai sumber dan unit analisis yang memadai sehingga tidak digunakan dalam galley. Penelitian lanjutan perlu membandingkan beberapa sektor platform di Indonesia dan melibatkan pekerja dalam mendefinisikan kategori, masalah, serta solusi.

7. Simpulan

Marhaenisme tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk membaca pekerja dan produsen kecil yang memiliki alat operasional tetapi tidak menguasai struktur ekonomi tempat mereka bekerja. Dalam ekonomi platform, kendaraan, gawai, dan komputer memberi akses produksi, sedangkan algoritma, data, harga, serta aturan akun tetap dikendalikan perusahaan. Marhaen digital karena itu menggambarkan ketegangan antara kepemilikan terbatas, ketergantungan sistemik, dan perjuangan memperoleh pembagian nilai yang adil.

Generasi Z dapat menjadi sekutu dalam memperluas visibilitas, literasi, dan mobilisasi, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai kelompok homogen. Titik temu yang produktif memerlukan organisasi pekerja, bukti empiris, advokasi regulasi, dan desain teknologi yang akuntabel. Marhaenisme digital bukan penolakan teknologi, melainkan tuntutan agar teknologi melayani kemandirian, keadilan sosial, dan kesejahteraan publik.

8. Rekomendasi

Penelitian empiris berikutnya perlu mendokumentasikan pengalaman pengemudi, kurir, kreator, pekerja lepas, petani digital, dan pedagang mikro melalui survei, wawancara, serta analisis data kerja. Perbandingan antarsektor akan menunjukkan kapan kepemilikan alat meningkatkan daya tawar dan kapan kontrol algoritmik justru memperdalam ketergantungan.

Pembuat kebijakan, platform, organisasi pekerja, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi perlu mengembangkan standar transparansi, keselamatan, perlindungan sosial, serta mekanisme keberatan yang mudah diakses. Agenda tersebut harus disusun bersama pekerja agar istilah keadilan digital diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat diukur.

Daftar Pustaka

Adams, Cindy. 1965. Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Buissink, A. 2023. The Machine System of Digital Labor Platforms and the Algorithm as Transmitting Mechanism. Rethinking Marxism, 35(1), 8-23. doi: 10.1080/08935696.2022.2159718.

Gandini, Alessandro. 2021. Digital Labour: An Empty Signifier? Media, Culture & Society, 43(2), 369-380. doi: 10.1177/0163443720948018.

Jayatissa, K. A. D. U. 2023. Generation Z: A New Lifeline. A Systematic Literature Review. Sri Lanka Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 179-186.

Kaplan, E. B. 2020. The Millennial/Gen Z Leftists Are Emerging: Are Sociologists Ready for Them? Sociological Perspectives, 63(3), 408-427.

Kuswono. 2016. Marhaenism: Social Ideology Created by Sukarno. Historia, 4(2), 119-130. doi: 10.24127/hj.v4i2.549.

Mumtaha, H. A., & H. A. Khoiri. 2019. Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 pada Perilaku Masyarakat Ekonomi. Jurnal Pilar Teknologi, 4(2), 55-60.

Peredy, Z., L. Vigh, W. Quingyu, & J. Muyi. 2024. Analysing Generation Z Communication Attitudes, Values and Norms. Acta Periodica, 30, 4-19.

Pradipta, Muhammad Arya, Abdul Wafi, Marita, Rahmadani Luthfiah, Fariz Ikhsan, & Prawidya Raihan Syafaat. 2024. Cinta Tanah Air pada Era Digital: Peran Generasi Z dalam Mempertahankan Identitas Nasional. Populer, 3(4), 109-118.

Robin, P., S. Alvin, & T. Hasugian. 2022. Gen-Z Perspective on Politics: High Interest, Uninformed, and Urging Political Education. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(3).

Taylor, K., P. Van Dijk, S. Newnam, & D. Sheppard. 2023. Physical and Psychological Hazards in the Gig Economy System: A Systematic Review. Safety Science, 166, 106234. doi: 10.1016/j.ssci.2023.106234.

Vallas, Steven, & Juliet B. Schor. 2020. What Do Platforms Do? Understanding the Gig Economy. Annual Review of Sociology, 46, 273-294.

Wang, Jing, & Julia Tomassetti. 2024. Labor-Capital Relations on Digital Platforms: Organization, Algorithmic Discipline and the Social Factory Again. Sociology Compass, 18(3), e13192.

ORATIO DIRECTA **Copyright** © 2026 Novance Silitonga et al.
Communication Studies Journal, FISIP, Universitas Bung Karno, Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.